

KOORDINASI KEBIJAKAN MONETER G20: ANALISIS STABILITAS EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG VS MAJU (2000–2023)

Andrina Sabariah

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura*

ABSTRACT

This study examines the role of the G20 in setting monetary policy for global economic stability. Analysis of data from 2000–2023 shows that in developing countries, credit to the private sector reduces inflation, but increasing money supply actually inhibits economic growth. In developed countries, both factors have a negative impact on growth, indicating an imbalance in resource allocation. The study also discusses G20 policies after the 2008 crisis and the pandemic, such as monetary stimulus and sustainable financial reforms. Although the G20 is effective as a crisis forum, challenges such as unequal representation and dominance of Developed Countries and non-compliance with collective agreements.

Keywords: *G20, monetary policy, global economic stability, money supply, private sector credit, economic growth, inflation.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran G20 dalam mengatur kebijakan moneter untuk stabilitas ekonomi global. Analisis data 2000–2023 menunjukkan bahwa di negara berkembang, kredit ke sektor swasta menurunkan inflasi, tetapi peningkatan uang beredar justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Di negara maju, kedua faktor tersebut berdampak negatif pada pertumbuhan, menunjukkan ketidakseimbangan alokasi sumber daya. Studi juga membahas kebijakan G20 pasca-krisis 2008 dan pandemi, seperti stimulus moneter dan reformasi keuangan berkelanjutan. Meski G20 efektif sebagai forum krisis, tantangan seperti ketimpangan representasi dan dominasi Negara Maju dan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan bersama.

Kata Kunci: G20, kebijakan moneter, stabilitas ekonomi global, uang beredar, kredit sektor swasta, pertumbuhan ekonomi, inflasi.

1. PENDAHULUAN

Sebelum terbentuknya G20, pada dekade 1990-an, kondisi moneter dunia sangat kompleks seiring liberalisasi pasar keuangan dan integrasi ekonomi. Krisis moneter Asia 1997/1998 menjadi bukti nyata betapa kebijakan moneter yang tidak terkoordinasi dapat memicu efek domino yang meluluhlantakkan perekonomian regional. Sebelum tahun 1999, tata kelola kebijakan moneter global tercermin dalam fragmen-fragmen kerjasama yang terbatas dan kerap diwarnai ketimpangan. Kebijakan moneter, sebagai instrumen utama bank sentral dalam mengendalikan suplai uang, suku bunga, dan inflasi, pada era pasca-Perang Dunia II hingga akhir abad ke-20, lebih banyak diarahkan oleh kepentingan domestik negara-negara maju. Sistem Bretton Woods (1944-1971) sempat menciptakan stabilitas melalui patokan nilai tukar tetap berbasis dolar AS dan emas,

tetapi keruntuhannya pada awal 1970-an mengantarkan dunia pada rezim nilai tukar mengambang yang rentan gejolak.

Negara-negara berkembang, yang minim pengaruh dalam forum seperti G7 atau IMF, sering menjadi korban dari kebijakan moneter negara maju seperti lonjakan suku bunga AS di era 1980-an di bawah Paul Volcker yang memicu krisis utang di Amerika Latin. Tanpa kerangka koordinasi yang inklusif, kebijakan moneter menjadi "senjata ekonomi" yang justru memperlebar jurang ketidaksetaraan global. Saat itu, respons negara maju cenderung lamban dan terfragmentasi, sementara IMF sebagai lembaga multilateral dikritik karena menerapkan kebijakan pengetatan moneter yang pro-siklikal bagi negara krisis. Di sisi lain, bank sentral negara maju seperti Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa lebih fokus pada stabilitas domestik, mengabaikan dampak eksternal kebijakan mereka terhadap arus modal dan stabilitas mata uang negara berkembang.

Kondisi ini memperlihatkan vakum kepemimpinan kolektif dalam mengelola interdependensi moneter global. Dalam ketiadaan forum yang representatif, dunia memasuki milenium baru dengan warisan kerentanan sistemik yang mendesak lahirnya mekanisme koordinasi baru sebuah peran yang kemudian diemban oleh G20. G-20 dibentuk sebagai inovasi baru dalam memperkuat kerja sama multilateral. Keanggotaan yang terdiri dari 20 negara dianggap memiliki dampak signifikan dan sistemik terhadap perekonomian global. Negara-negara ini secara kolektif menguasai lebih dari 80 persen ekonomi dunia, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB), dominasi dalam arus investasi asing, pengaruh di pasar global, perdagangan internasional, serta jumlah penduduk.

Premis yang mendasari adalah bahwa stabilitas ekonomi di negara-negara anggota G-20 akan berkontribusi pada kestabilan ekonomi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberhasilan forum ini diyakini akan memberikan dampak besar secara sistemik, termasuk bagi negara-negara dan entitas ekonomi yang bukan anggota G-20. Pertumbuhan ekonomi di antara anggota G-20 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di negaranegara lain.

2. KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur dalam penelitian ini berangkat dari teori ekonomi moneter yang menempatkan kebijakan moneter sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian jumlah uang beredar dan penyaluran kredit ke sektor swasta. Dalam teori kuantitas uang, peningkatan jumlah uang beredar berpotensi mendorong inflasi apabila tidak diimbangi oleh peningkatan output riil. Namun, perkembangan teori moneter modern menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu linear, karena efektivitas kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi, tingkat kedalaman sektor keuangan, serta efisiensi alokasi kredit. Perbedaan karakteristik inilah yang menjadi dasar penting dalam membedakan dampak kebijakan moneter antara negara maju dan negara berkembang.

Selain itu, penelitian ini mengacu pada literatur ekonomi internasional yang membahas peran G20 sebagai forum koordinasi kebijakan moneter dan keuangan global. Pasca krisis keuangan global 2008, G20 dipandang sebagai aktor sentral dalam mengoordinasikan respons kebijakan melalui pelonggaran moneter, penyediaan likuiditas global, serta penguatan arsitektur keuangan internasional. Pembentukan Financial Stability Board (FSB), koordinasi quantitative easing, serta dukungan terhadap IMF menjadi bukti peran G20 dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global. Namun, literatur juga menyoroti keterbatasan G20 karena sifat keputusannya

yang tidak mengikat (*non-binding*), sehingga efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota.

Kajian empiris yang digunakan dalam penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara uang beredar, kredit sektor swasta, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi bersifat kontekstual. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kredit sektor swasta dapat menekan inflasi melalui peningkatan kapasitas produksi, khususnya di negara berkembang. Sebaliknya, di negara maju, peningkatan uang beredar dan kredit tidak selalu mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan dapat berdampak negatif apabila kredit dialokasikan pada sektor nonproduktif atau memicu ketidakseimbangan keuangan. Temuan-temuan empiris tersebut menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dan arah analisis penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika ekonomi lintas waktu dan perbedaan karakteristik antarnegara secara simultan. Data panel memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan data time series atau cross-section tunggal, terutama dalam konteks perbandingan negara maju dan negara berkembang anggota G20.

Objek penelitian dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu negara berkembang dan negara maju anggota G20. Pengelompokan ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan respons kebijakan moneter terhadap stabilitas ekonomi berdasarkan tingkat pembangunan ekonomi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah uang beredar dan kredit ke sektor swasta, sedangkan variabel dependen meliputi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan variabel ini didasarkan pada teori moneter dan literatur empiris yang menempatkan kedua variabel tersebut sebagai saluran utama transmisi kebijakan moneter.

Tahapan metodologi selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data sekunder periode 2000-2023, yaitu sejak pembentukan G20 hingga periode pasca pandemi COVID-19. Data kemudian dianalisis menggunakan regresi panel dengan pengujian parsial (uji t) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen, serta pengujian simultan (uji F) untuk menilai pengaruh gabungan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil estimasi selanjutnya diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori moneter dan peran koordinatif G20.

Melalui tahapan metodologi tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan menguji hubungan statistik antarvariabel, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas koordinasi kebijakan moneter G20 dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Dengan demikian, metodologi yang digunakan mendukung tujuan penelitian untuk menjelaskan perbedaan dampak kebijakan moneter antara negara maju dan negara berkembang secara teoritis dan empiris.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Group Of Twenty (G20)

Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin, Jerman, pada Desember 1999, di mana para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara anggota berkumpul untuk membahas isu-isu penting terkait kestabilan ekonomi dunia. Awalnya, G20 berfungsi sebagai forum informal yang berfokus pada pembahasan kebijakan ekonomi dan keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu, peran G20 mengalami perluasan, terutama pasca terjadinya Krisis Keuangan

Global tahun 2008, yang mendorong para pemimpin dunia untuk meningkatkan kerja sama dalam menghadapi persoalan ekonomi yang semakin rumit.

Krisis tahun 2008 menjadi momen penting bagi G20, ketika Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, mengundang para pemimpin negara anggota G20 untuk menghadiri KTT di Washington, D.C. Pertemuan ini menjadi tonggak perubahan G20 dari forum di tingkat menteri menjadi forum di tingkat kepala negara/pemerintahan, dengan tujuan menyatukan langkah-langkah global dalam merespons krisis. Sejak saat itu, G20 secara rutin mengadakan konferensi tingkat tinggi tahunan, tempat para pemimpin negara anggota membahas berbagai isu ekonomi dan keuangan yang mendesak serta merumuskan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

G20 tidak memiliki sekretariat permanen, dan agenda pertemuan ditentukan oleh negara yang menjadi tuan rumah. Setiap tahun, kepresidenan G20 berganti tangan di antara negaranegara anggota, yang menciptakan dinamika baru dalam diskusi dan kolaborasi. G20 juga melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk bisnis, masyarakat sipil, dan akademisi, melalui kelompok keterlibatan resmi seperti B20 (Business 20), C20 (Civil 20), dan T20 (Think 20). Dalam beberapa tahun terakhir, G20 telah berfokus pada berbagai isu, termasuk reformasi sistem keuangan internasional, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan moneter yang diusulkan dan diimplementasikan oleh G20 bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi global dan mencegah terulangnya krisis di masa depan. Kebijakan moneter adalah alat utama bank sentral untuk mengatur uang beredar, suku bunga, dan menjaga stabilitas keuangan guna mencapai tujuan makroekonomi seperti pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam skala global, koordinasi kebijakan ini menjadi penting karena saling ketergantungan antarnegara. G20 berfungsi sebagai forum strategis untuk menyinergikan kebijakan moneter dalam menghadapi krisis global, pandemi, dan ketimpangan pemulihan. Melalui forum ini, negara-negara G20 menyusun kerangka kolaboratif yang menghubungkan variabel seperti uang beredar dan kredit dengan indikator utama seperti inflasi dan PDB, demi menjaga stabilitas ekonomi dunia.

4.2. Kebijakan dan Komitmen G20

a. *Koordinasi Pelonggaran Moneter Global (Global Monetary Easing)*

Koordinasi Pelonggaran Moneter Global oleh G20 adalah upaya bersama negaranegara G20 untuk merespons krisis keuangan 2008-2009 melalui kebijakan moneter terkoordinasi guna menstabilkan sistem keuangan, memulihkan ekonomi, dan mencegah resesi yang lebih dalam. Krisis ini menyebabkan gangguan besar pada pasar dan ekonomi global, sehingga mendorong G20 mengambil langkah kolektif.

Langkah-langkah tersebut meliputi: Penurunan suku bunga acuan untuk mendorong pinjaman dan investasi. Quantitative Easing (QE) oleh bank sentral seperti The Fed dan Bank of England guna meningkatkan likuiditas dan menurunkan suku bunga jangka panjang. Peningkatan likuiditas global dengan menambah lebih dari \$1 triliun ke institusi internasional seperti IMF. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter melalui stimulus ekonomi untuk mempercepat pemulihan global. (Dolorosa, 2015).

b. *Stabilitas Moneter dan Ketahanan Sistem Keuangan*

G20 mengambil berbagai langkah penting untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan global, terutama pasca krisis 2008. Salah satu langkah utama adalah pembentukan Financial Stability Board (FSB) pada 2009 yang menggantikan Financial Stability Forum (FSF). FSB berperan dalam memantau sistem keuangan global, memberikan

rekomendasi kebijakan, serta mengoordinasikan otoritas nasional dan lembaga internasional. G20 juga mendorong reformasi sektor keuangan melalui penguatan regulasi prudensial seperti implementasi Basel III, pengurangan risiko institusi 'too big to fail', pengawasan pasar derivatif OTC, dan pengaturan shadow banking. Untuk mendukung transparansi, diluncurkan Data Gaps Initiative (DGI), yang bertujuan menutup kekurangan data dalam memantau risiko sistemik.

Selain itu, G20 berkomitmen menyalurkan bantuan melalui re-channeling kuota SDR IMF senilai US\$100 miliar kepada negara-negara rentan. Kebijakan makroprudensial turut diperkuat, termasuk pelonggaran rasio LTV dan insentif likuiditas, guna menjaga stabilitas sistem keuangan. FSB juga menyoroti risiko dari sektor keuangan non-bank, yang kini menyumbang hampir setengah dari aset keuangan global, dan merekomendasikan peningkatan pengawasan atas sektor tersebut.

c. Kebijakan Moneter di Masa Pandemi COVID-19

Dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, negara-negara G20 menekankan pentingnya koordinasi internasional agar respons kebijakan saling mendukung dan efektif secara global. G20 mengeluarkan pernyataan bersama pada Maret 2020, menyatakan komitmen untuk menggunakan seluruh instrumen fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, disusun Rencana Aksi G20 yang berisi prinsip dan langkah konkret untuk mendukung pemulihan ekonomi global melalui koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan struktural.

G20 juga bekerja erat dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk memberikan dukungan finansial dan teknis, terutama kepada negara berkembang dan berpendapatan rendah. Di samping itu, G20 mendorong transparansi dan berbagi informasi dengan berbagai organisasi global termasuk WHO, guna memastikan kebijakan yang responsif dan terkoordinasi dalam menghadapi pandemi.

d. Strategi Keluar (Exit Strategy) dan Normalisasi Kebijakan Moneter

Strategi Keluar (Exit Strategy) mengacu pada proses bertahap menghentikan kebijakan moneter luar biasa yang diterapkan selama krisis, sementara normalisasi merujuk pada transisi menuju kebijakan moneter yang lebih konvensional, seperti kenaikan suku bunga dan pengurangan likuiditas. G20 melaksanakan langkah-langkah ini melalui komunikasi terbuka dan forward guidance dari bank sentral, penyesuaian suku bunga secara bertahap (*gradual tightening*), serta pengurangan pembelian aset (*quantitative tightening*). Koordinasi antarbank sentral dilakukan melalui forum rutin, guna berbagi informasi dan memastikan transisi kebijakan berjalan lancar. Selain itu, sinkronisasi dengan kebijakan fiskal juga menjadi bagian penting agar normalisasi moneter selaras dengan dukungan struktural dari pemerintah. Sinkronisasi dengan Kebijakan Fiskal.

e. Digitalisasi dan Inovasi Moneter

Digitalisasi G20 mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mereformasi sistem keuangan dan meningkatkan efisiensi serta inklusivitas. Salah satu fokus utama adalah pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC), yang menggabungkan teknologi dengan stabilitas moneter. Modernisasi sistem pembayaran juga menjadi prioritas, termasuk penerapan sistem pembayaran real-time dan teknologi blockchain untuk transaksi yang cepat dan aman. Di sisi regulasi, G20 memperkuat standar keamanan, perlindungan konsumen, dan interoperabilitas melalui forum kolaboratif antar pemangku kepentingan. Selain itu,

kolaborasi publik-swasta terus didorong guna mengembangkan inovasi keuangan digital yang inklusif, didukung peningkatan kapasitas digital nasional.

f. *Kebijakan Moneter Hijau dan Sustainable Finance G20 (2022-Sekarang)*

Perubahan iklim yang memicu bencana global seperti banjir ekstrem di Korea Selatan dan kekeringan di Eropa mendorong G20 untuk mengintegrasikan risiko iklim ke dalam kebijakan moneter dan sistem keuangan. Sustainable Finance Working Group (SFWG), yang dibentuk pada 2021 di bawah Presidensi Italia, menjadi motor utama penyusunan strategi keuangan berkelanjutan. Kelompok kerja ini merancang *G20 Sustainable Finance Roadmap* yang berfokus pada tiga area:

- 1) Kerangka keuangan transisi: Mengakui aktivitas ekonomi "transisi" (misalnya penutupan PLTU batu bara) sebagai bagian dari proyek hijau.
- 2) Aksesibilitas instrumen keuangan berkelanjutan: Mendorong penerbitan obligasi hijau, sukuk hijau, dan instrumen pasar uang ramah lingkungan dengan insentif harga kompetitif.
- 3) Kebijakan pendukung transisi: Mengintegrasikan penetapan harga karbon dan insentif fiskal-makroprudensial.

g. *Reformasi Kuota IMF dan Global Financial Safety Net (2023)*

Reformasi kuota IMF bertujuan memperbarui struktur kepemilikan dan hak suara (voting power) negara anggota agar lebih mencerminkan kekuatan ekonomi aktual, terutama meningkatkan representasi negara berkembang dan emerging markets. Kuota IMF menentukan kontribusi keuangan, akses pinjaman, dan hak suara negara anggota. Namun, distribusi kuota saat ini dinilai tidak proporsional, di mana negara maju seperti AS dan Eropa mendominasi, sementara negara berkembang seperti Indonesia dan India kurang terwakili. Poin Utama Reformasi Kuota IMF:

- 1) Peningkatan Kuota untuk Negara Berkembang. Kuota negara berkembang seperti China, India, dan Indonesia perlu ditingkatkan untuk mencerminkan kontribusi mereka terhadap PDB global. Misalnya, China hanya memiliki 6,4% hak suara IMF padahal menyumbang 18% PDB global. Kuota baru diharapkan mengurangi dominasi negara maju (AS dan Eropa) yang saat ini menguasai 55% hak suara.
- 2) Penyesuaian Berbasis Ekonomi Riil. Kuota harus memperhitungkan parameter ekonomi seperti PDB, keterbukaan perdagangan, dan cadangan devisa, bukan hanya kapasitas finansial historis.
- 3) Penguatan Kapasitas Pinjaman IM. IMF membutuhkan tambahan sumber daya permanen (*quota-based*) sebesar 550 miliar–1,16 triliun untuk menutupi kesenjangan pembiayaan negara berpenghasilan rendah (LICs) dan menengah (MICs) dalam menghadapi krisis.

4.3. Melihat Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Negara Anggota G20

Negara-negara anggota G20, yang terdiri dari negara-negara maju dan berkembang dengan kontribusi signifikan terhadap output global, menyediakan konteks yang unik untuk mengkaji dinamika makroekonomi. Meskipun tergabung dalam satu forum internasional, karakteristik ekonomi antar negara G20 sangat beragam. Negara maju cenderung memiliki sistem keuangan yang lebih mapan dan kebijakan moneter yang relatif stabil, sedangkan negara berkembang

menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan keunikan karakteristik ekonomi anggota G20, penulis mencoba melakukan analisis sederhana dengan regresi panel untuk melihat pengaruh kebijakan moneter terhadap stabilitas ekonomi pada dua klasifikasi negara, yakni negara berkembang yang terdiri dari Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika selatan dan Turki, dan kepada negara maju yang terdiri dari Australia, Jepang, Korea, Amerika dan Inggris. Pada analisis sederhana ini, penulis menggunakan data uang beredar dan kredit sektor swasta sebagai *variable independent*, sedangkan untuk *variable dependen* digunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data periode tahun 2000 dimana periode tersebut adalah tepat setelah berdirinya G20, sampai dengan tahun 2023.

4.3.1. *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Kredit ke Sektor Swasta terhadap Inflasi*

1) Uji Regresi pada Anggota G20 : Negara-Negara Berkembang

Berdasarkan hasil olah regresi yang dilakukan, analisis ini bertujuan untuk memahami pengaruh jumlah uang beredar (X1) dan kredit ke sektor swasta (X2) terhadap inflasi (Y1). Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki koefisien positif, namun tidak signifikan secara statistik. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada hubungan positif antara jumlah uang beredar dengan inflasi, hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan dalam model ini.

Tabel 1.1 Uji t, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1, Negara Berkembang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C X1	10.28283	2.758288	3.727976	0.0002
	0.055375	0.047766	1.159299	0.2476
X2	-0.119343	0.045257	-2.636992	0.0090

Secara umum dalam teori ekonomi klasik dan moneter, jumlah uang beredar (*money supply*) biasanya berpengaruh positif terhadap inflasi, artinya, semakin banyak uang yang beredar, semakin besar potensi terjadinya inflasi. Penelitian oleh Amhimmid dkk., (2021) menjelaskan hasil yang sama dengan yang terjadi pada negara berkembang Anggota G20 ini, jumlah uang beredar tidak signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek. Hal ini dapat terjadi dalam situasi ketidakpastian ekonomi tinggi (misalnya resesi), masyarakat dan bisnis cenderung menahan uang tunai alih-alih menggunakannya untuk transaksi atau investasi. Susmiati dkk, (2021) menemukan bahwa Jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia selama 2011-2018. Kondisi seperti ini dapat terjadi jika dalam periode pengamatan, pemerintah atau bank sentral melakukan pengetatan moneter (misalnya menaikkan suku bunga atau mengurangi likuiditas), maka jumlah uang beredar bisa berkurang. Pengurangan ini bisa menekan permintaan agregat, sehingga inflasi ikut turun. Sedangkan untuk pengaruh Kredit ke Sektor Swasta terhadap inflasi pada penelitian ini ditemukan hubungan negatif signifikan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan kredit ke sektor swasta cenderung tingkat inflasi secara signifikan dalam konteks analisis ini temuan ini serupa dengan penelitian Adegboyega, dkk. (2023).

2) Uji Regresi pada Anggota G20 : Negara-Negara Maju

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah uang beredar (X1) dan kredit ke sektor swasta (X2) terhadap tingkat inflasi (Y1) di sejumlah negara maju. Hasil uji t menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap inflasi

secara individual. Variabel jumlah uang beredar (X1) memiliki koefisien sebesar 0,023894 dengan nilai probabilitas 0,0033, yang berarti bahwa setiap peningkatan jumlah uang beredar akan cenderung meningkatkan tingkat inflasi. Hal ini selaras dengan teori kuantitas uang. Jika Kecepatan perputaran uang stabil dan Output riil tidak tumbuh cukup cepat, peningkatan Jumlah uang beredar akan langsung meningkatkan harga. Ningsih, dkk. (2019) menemukan jumlah uang beredar memiliki dampak positif terhadap inflasi dalam jangka panjang.

Tabel 1.2 Uji t, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1, Negara Maju

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C X1	2.319364	1.066506	2.174732	0.0317
	0.023894	0.007963	3.000764	0.0033
X2	-0.022717	0.009895	-2.295782	0.235

Sebaliknya, variabel kredit ke sektor swasta (X2) memiliki koefisien sebesar 0,022717 dan nilai probabilitas 0,0235, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kredit ke sektor swasta justru berpotensi menurunkan tingkat inflasi. Hal ini dapat terjadi karena kredit yang meningkat dapat mendukung aktivitas produksi yang pada gilirannya menekan harga.

4.3.2. Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Kredit ke Sektor Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi

1) Uji Regresi Pada Anggota G20 : Negara-Negara Berkembang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah uang beredar (X1) dan kredit ke sektor swasta (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) di Negara anggota G20 yang masuk klasifikasi negara berkembang. Pada Uji Signifikansi Parsial (Uji t), diketahui bahwa: Variabel jumlah uang beredar (X1) berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2). Dengan kata lain, peningkatan jumlah uang beredar justru menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini serupa dengan penelitian Sudirman, dkk. (2022) Jumlah uang beredar yang tinggi justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Hal ini bisa diartikan bahwa kelebihan likuiditas tidak serta merta meningkatkan produksi, mungkin disebabkan oleh ketidakefisienan distribusi modal atau kurangnya kepercayaan pasar. Keseimbangan antara pengendalian inflasi dan stabilitas pertumbuhan menjadi kunci kebijakan moneter yang sehat.

Tabel 1.3 Uji t, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y2, Negara Berkembang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C X1	10.24398	1.061619	9.649392	0.0000
	-0.103421	0.026020	-3.974669	0.0001
X2	0.019062	0.023187	0.822131	0.4120

Sementara itu, variabel kredit ke sektor swasta (X2) memiliki koefisien sebesar 0.0191 dengan nilai probabilitas 0.4120 (> 0.05), yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan, pada negeri berkembang anggota G20, kredit sektor swasta tidak dialokasikan ke sektor produktif, dan tidak memiliki nilai tambah. Secara simultan, model diuji melalui Uji F, dengan hasil probabilitas F-statistik sebesar 0.000000 (< 0.05), yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2) Uji Regresi Pada Anggota G20 : Negara-negara Maju

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis regresi panel untuk melihat pengaruh jumlah uang beredar (X1) dan kredit ke sektor swasta (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) di negara-negara maju. Pada pengujian hipotesis secara parsial (Uji t), kedua variabel independen, yaitu jumlah uang beredar (X1) dan kredit ke sektor swasta (X2), menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai probabilitas X1 sebesar 0,0035 dan X2 sebesar 0,0008, keduanya lebih kecil dari 0,05.

Tabel 1.1 Uji t, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y2, Negara Maju

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.368883	0.999515	7.372456	0.0000
X1	-0.011490	0.003860	-2.976860	0.0035
X2	-0.023418	0.006799	-3.444193	0.0008

Menariknya, kedua variabel ini memiliki koefisien negatif, yakni -0.011490 untuk X1 dan -0.023418 untuk X2. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah uang beredar dan kredit kepada sektor swasta justru berasosiasi dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Amaliyah dan Aryanto, (2022) menemukan periode 2015-2020 di Indonesia jumlah uang beredar memiliki dampak negatif signifikan terhadap inflasi. Chaitip, dkk. (2015) juga menemukan hal serupa saat menganalisis hubungan antara jumlah uang beredar (money supply) dan pertumbuhan ekonomi (GDP growth) di negara-negara ASEAN Economic Community (AEC), dimana Indonesia, Filipina, dan Laos, jumlah uang beredar berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan jangka pendek.

Kredit sektor swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek juga ditemukan oleh Begum dan Shawkatul Islam Aziz (2019). Fenomena ini mungkin mencerminkan bahwa di negara-negara maju, peningkatan uang beredar dan kredit tidak selalu berdampak positif, bisa jadi karena adanya efek inflasi, konsumsi yang tidak produktif, atau alokasi kredit yang tidak efisien. Penelitian ini memberikan wawasan penting bahwa kredit yang tidak efektif dapat menurunkan kinerja ekonomi, dan bahwa kualitas alokasi kredit lebih penting dari kuantitasnya.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Di tengah badai krisis yang silih berganti, dari guncangan finansial 2008 hingga pandemi yang mengubah dunia, G20 telah menjadi mercusuar harapan. Forum ini membuktikan bahwa ketika negara-negara bersatu, maka akan ada kekuatan untuk menenangkan gelombang ketidakpastian. Bayangkan saja: saat ekonomi global hampir tenggelam oleh krisis 2008, negara-negara G20 bersama-sama memompa dana darurat, menurunkan suku bunga, dan membuka keran pinjaman untuk menyelamatkan bisnis. Hasilnya? Pemulihan perlahan tapi nyata, meski tidak sempurna. Namun, jalan menuju stabilitas tidak selalu mulus. Di negara berkembang, tambahan kredit untuk usaha kecil justru membantu menahan laju kenaikan harga. Sementara di negara maju, terlalu banyak uang beredar malah seperti api yang membakar pertumbuhan ekonomi.

Ini mengingatkan kita: kebijakan moneter bukan obat ajaib yang cocok untuk semua. Setiap negara punya cerita berbeda, dan solusinya harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Pekerjaan rumah masih menumpuk. Bagaimana memastikan negara miskin tidak tertinggal saat

negara kaya mengetatkan kebijakan moneternya? Bagaimana mengelola transisi dari kebijakan darurat pandemi tanpa memicu resesi baru? Di sinilah transparansi dan kerja sama terus diuji. G20 perlu tetap menjadi ruang dialog, tempat suara negara kecil didengar, dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Belum lagi G20 tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa negara anggota mematuhi kesepakatan. Keputusan bersifat sukarela (non-binding), sehingga implementasinya bergantung pada komitmen politik masing-masing negara.

G20 adalah kisah tentang kolaborasi. Bukan hanya angka-angka di neraca keuangan, tapi tentang manusia, bisnis, dan masa depan bersama. Tantangan ke depan; dari perubahan iklim hingga ketimpangan teknologi, memerlukan lebih dari sekadar kebijakan moneter. Dibutuhkan empati, keberanian untuk berbagi, dan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Jika ini bisa diwujudkan, G20 bukan hanya akan dikenang sebagai penyelamat krisis, tapi juga sebagai arsitek dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegboyega, S. B., Odusanya, I. A., Ogede, J. S., & Atoyebi, O. E. (2023). Domestic Credit and Inflation Rate Shock: A New Empiric Evidence from Nigeria. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2023.7.1.1649>
- Amaliyah, F., & Aryanto, A. (2022). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1342–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.737>
- Amhimmid, O. M. H., Yanto, H., & Setyadharma, A. (2021). The Effect of Interest Rates, Money Supply and Exchange Rate on Inflation in Indonesia and Libya. *Business and Economic Analysis Journal*, 1(2), 104–121. <https://doi.org/10.15294/beaj.v1i2.33590>
- Begum, H., & Shawkatul Islam Aziz, M. (2019). Impact of Domestic Credit to Private Sector on Gross Domestic Product in Bangladesh. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 10(1), 45–54. <https://doi.org/10.9790/5933-1001014554>
- Chaitip, P., Chokethaworn, K., Chaiboonsri, C., & Khounkhalax, M. (2015). Money Supply Influencing on Economic Growth-wide Phenomena of AEC Open Region. *Procedia Economics and Finance*, 24(July), 108–115. [https://doi.org/10.1016/s22125671\(15\)00626-7](https://doi.org/10.1016/s22125671(15)00626-7)
- Dolorosa, G. N. (2015). <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150209/9/400744/pertemuan-g20kebijakan-moneter-akomodatif-sampai-ekonomi-membaik>
- Sudirman, Hidayat A, N., & Rahman, A. (2022). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al- Buhuts*, 18, 349–364. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/11090>
- Susmiati, S., Giri, N. P. R., & Senimantara, N. (2021). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2018. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4(2), 68–74. <https://doi.org/10.22225/wedj.4.2.2021.68-74>